



## Dampak Perubahan Struktur Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Adinda Maulida Amalia<sup>\*1)</sup>, Yuni Prihadi Utomo<sup>2)</sup>

Universitas Muhammadiyah Surakarta<sup>1-2</sup>

Email: [b300200320@student.ums.ac.id](mailto:b300200320@student.ums.ac.id) \*

### ABSTRACT

*This research focuses on examining the impact of changes in economic structure and assessing the effectiveness of government program initiatives on income inequality. Income inequality becomes the dependent variable, then the industrial sector GRDP ratio, service sector GRDP ratio, Smart Indonesia Program, Food Social Assistance and Provincial Minimum Wage become the independent variables. The empirical approach in this research involves analysis of panel data from 34 provinces in Indonesia during the 2018-2022 period, using data collected from the Central Statistics Agency and the Ministry of Education and Culture. The research method applied is the Fixed Effect Model (FEM). The findings of this research show that the industrial sector GRDP ratio variable and the Provincial Minimum Wage show a negative influence on income inequality. Meanwhile, other variables, including the GRDP ratio in the service sector, the Smart Indonesia Program, and Social Food Assistance, did not show a significant influence on income inequality.*

**Keywords:** *Income Inequality, Industrial Sector GRDP, Service Sector GRDP, Smart Indonesia Program, Food Social Assistance*

### ABSTRAK

Penelitian berfokus untuk menguji dampak perubahan struktur ekonomi serta menilai efektivitas program inisiatif pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan menjadi variabel dependen, kemudian variabel rasio PDRB sektor industri, rasio PDRB sektor jasa, Program Indonesia Pintar, Bantuan Sosial Pangan dan Upah Minimum Provinsi menjadi variabel independen. Pendekatan empiris dalam penelitian ini melibatkan analisis data panel dari 34 provinsi di Indonesia selama periode 2018-2022, menggunakan data yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik dan Kemendikbud. Metode penelitian yang diterapkan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel rasio PDRB sektor industri dan Upah Minimum Provinsi menunjukkan pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara itu, variabel lainnya, termasuk rasio PDRB sektor jasa, Program Indonesia Pintar, dan Bantuan Sosial Pangan, tidak mengindikasikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

**Kata Kunci:** Ketimpangan Pendapatan, PDRB sektor Industri, PDRB sektor Jasa, Program Indonesia Pintar, Bantuan Sosial Pangan

## PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan merujuk pada disparitas antara kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dan mereka yang memiliki pendapatan rendah dalam suatu negara. Tingkat ketimpangan pendapatan ini dapat digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu ketimpangan rendah, sedang, dan tinggi tergantung dari besar kecilnya perbedaan pendapatan yang terjadi di masyarakat (Oksamulya & Anis, 2020). Berdasarkan koefisien Gini, ketimpangan pendapatan dianggap rendah jika nilai koefisien Gini berada di bawah 0,3. Ketimpangan pendapatan berada pada tingkat sedang jika nilai koefisien Gini berkisar antara 0,3 hingga 0,5. Sementara itu, ketimpangan pendapatan dikategorikan tinggi atau sangat timpang jika nilai koefisien Gini melebihi 0,5. (Wibowo, 2017).

Ketimpangan pendapatan telah menjadi tantangan global yang melibatkan semua negara, baik negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi maupun negara berkembang yang masih dalam proses pertumbuhan ekonomi (Kusuma et al., 2019). Sebagai negara berkembang, Indonesia juga menghadapi permasalahan ketimpangan dan kemiskinan (Alamanda, 2020). Ketimpangan pendapatan di Indonesia tergolong dalam kategori tingkat sedang (Farhan & Sugianto, 2022).

Menurut Imam & Jamaliah, (2023) permasalahan ketimpangan pendapatan dapat diatasi dengan perubahan struktural dan kebijakan pemerintah. Perubahan struktural merupakan prasyarat untuk meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan dan mengatasi permasalahan perekonomian, serta mendukung kelangsungan pembangunan itu sendiri (Hasan, 2022). Sedangkan kebijakan pemerintah mengacu pada serangkaian keputusan yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini mengatasi masalah ketimpangan. Namun beberapa kebijakan pemerintah seringkali tidak diimbangi dengan prinsip keadilan dan kesetaraan sehingga memicu kesenjangan atau kesenjangan (Pratiwi, 2021).

Menurut Mydral, ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang cenderung disebabkan oleh kekuatan dampak balik (backwash effects) yang lebih dominan daripada dampak sebar (spread effect), yang menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih cenderung terpusat di suatu wilayah atau sektor tertentu sehingga mengakibatkan kesenjangan pendapatan antar wilayah atau sektor meningkat (Jhingan, 2012).

Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada awalnya cenderung memburuk yang pada gilirannya juga menyebabkan buruknya distribusi pendapatan, namun pada tahap selanjutnya akan mulai membaik seiring dengan berjalannya pembangunan. Pernyataan ini kemudian dikarakterisasikan oleh kurva Kuznets "U terbalik" karena plot perubahan distribusi pendapatan yang

membujur (time series) dan diukur dengan menggunakan koefisien Gini seolah-olah terjadi seiring dengan peningkatan PDB per kapita, sehingga terlihat seperti huruf U terbalik di beberapa negara, terutama negara berkembang (Todaro & Smith, 2015).

Menurutnya Kuznets, (2011) tingkat perubahan struktur ekonomi yang tinggi termasuk dalam enam ciri perekonomian modern. Perubahan struktur perekonomian dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan pesat produksi pada sektor industri dan jasa (Tikson, 2005). Di negara berkembang, sektor manufaktur atau industri merupakan faktor penentu pertumbuhan yang penting, sedangkan sektor jasa lebih penting di negara maju (Szirmai, 2012). Dalam konteks ketimpangan di Indonesia, transformasi struktural berkorelasi dengan menurunnya tingkat ketimpangan pada masa industrialisasi, namun pada masa tertiarisasi tingkat ketimpangan kembali meningkat (Yusuf et al., 2021).

Terdapat dua landasan utama mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Pertama, Peneliti tertarik untuk meneliti apakah pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian (primer) ke sektor industri (sekunder) dan jasa (tersier) memiliki dampak terhadap ketimpangan pendapatan. Kedua, apakah kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk membantu masyarakat kelas bawah mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan laporan statistik pada tahun 2018, Indeks Gini Ratio Indonesia mencapai 0,384, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,3888. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,004 selama lima tahun. Di wilayah perkotaan, indeks Gini Ratio pada tahun 2018 mencapai 0,391 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,409, menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 0,018 pada periode yang sama. Sedangkan di perdesaan trennya cenderung stabil (BPS, 2022).

Khusus mengenai hubungan perubahan struktural dengan ketimpangan pendapatan, terdapat beberapa jenis literatur dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang menunjukkan hasil bahwa perubahan struktur ekonomi mempengaruhi ketimpangan pendapatan (Azizah & Suhartini, 2021) (Putri & Monika, 2022) (Nangarumba, 2015). Di sisi lain, ditemukan penelitian yang mengemukakan hasil temuannya bahwa perubahan struktur perekonomian tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu pada (Ikhsan et al., 2019) riset. (Nora Herlina et al., 2022) Penelitian menemukan bahwa sektor primer memberikan pengaruh negatif, sedangkan sektor tersier tidak memberikan pengaruh.

Menurut Soo, Koi, Kartinah dan You, pengaruh negatif PDB riil per kapita terhadap ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa peningkatan PDB berperan dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan dalam jangka Panjang (Goh et al., 2023). Dengan demikian, kebijakan pemerintah seperti Program Indonesia Pintar, Bantuan Sosial Pangan dan penetapan Upah Minimum

Provinsi merupakan wujud nyata upaya pemerintah dalam mengatasi dan mengatasi kesenjangan di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nangarumba, 2015; Masfila, 2021; Rahman & Putri, 2021) menunjukkan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi merugikan ketimpangan. Ada pula Istikharoh et al., (2020) penelitian yang menemukan hasil sebaliknya. Kemudian Gultom et al., (2020) penelitian menemukan bahwa bantuan pangan bagi penyandang disabilitas tidak mempengaruhi ketimpangan dan hal ini diperkuat dengan Yasni & Yulianto, (2020) penelitian yang menemukan bahwa rasio belanja bantuan sosial tidak mempengaruhi ketimpangan. Pemahaman terhadap hubungan antara kebijakan dan program pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat bisa dikatakan masih dalam tahap awal, sehingga belum banyak masyarakat yang memahami apakah program tersebut juga akan berdampak pada ketimpangan pendapatan atau tidak. Oleh karena itu, peneliti berupaya memahami pengaruh kebijakan pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian mengenai hubungan perubahan struktur ekonomi dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia telah dilakukan sebelumnya oleh Nangarumba. Namun peneliti menambahkan variabel Program Indonesia pintar yang bertujuan untuk meningkatkan jenjang pendidikan di Indonesia menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Meskipun sebelumnya telah dilakukan oleh Ansari Samani et al., (2024) yang mengaitkan pendidikan dengan ketimpangan pendapatan, namun penelitian tersebut hanya mencakup konteks Iran dan hingga saat ini belum ada penelitian di Indonesia yang secara khusus mengaitkan antara pendidikan dan ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan mengetahui pengaruh perubahan struktur perekonomian yang diwakili oleh Rasio PDRB Industri dan Rasio PDRB Pelayanan dan Kebijakan Pemerintah yang diwakili oleh Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pangan Sosial (BSP), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat Ketimpangan Pendapatan. di Indonesia periode 2018 hingga 2022.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan data panel, mengintegrasikan data series waktu dari tahun 2018 hingga 2022 dengan cross-section dari 34 provinsi di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis ketimpangan pendapatan. Variabel-variabel yang digunakan sebagai variabel independen diperoleh dengan menggabungkan tiga model penelitian yaitu model Putri & Monika, (2022), Gultom et al., (2020); dan Rahman & Putri, (2021). Variabel Rasio PDRB Sektor

Industri dan Rasio PDRB Jasa diambil dari model Putri & Monika, (2022), variabel Bantuan Sosial Pangan diambil dari model Gultom et al., (2020) dan variabel Upah Minimum Provinsi diambil dari model Rahman & Putri, (2021). Variabel Program Indonesia Pintar merupakan penelitian baru yang dimaksudkan sebagai tambahan evaluasi Kebijakan Pemerintah. Maka dari model tersebut dapat dibentuk model ekonometrika sebagai berikut:

$$GINI_{it} = \beta_0 + \beta_1 RPRDBind_{it} + \beta_2 RPRDBjasa_{it} + \beta_3 PIP_{it} + \beta_4 BSP_{it} + \beta_5 UMP_{it} + e_t$$

Keterangan:

GINI	: Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)
RPRDBind	: Rasio PDRB Sektor Industri (%)
RPRDBjasa	: Rasio PDRB Sektor Jasa (%)
PIP	: Program Indonesia Pintar (rupiah)
BSP	: Bantuan Sosial Pangan (rupiah)
UMP	: Upah Minimum Provinsi (rupiah)
$\varepsilon$	: Istilah kesalahan (faktor kesalahan)
$\beta_0$	: Konstan
$\beta_1 \dots \beta_5$	: Koefisien regresi variabel independen
t	: Rangkaian Waktu Tahunan (2018-2022)
$\iota$	: Wilayah (34 Provinsi)

Data berasal dari beberapa sumber yaitu Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data rasio sektor industri dan jasa diperoleh dengan cara membagi total PDRB per sektor dengan total PDRB (seluruh sektor) dan dikalikan dengan 100. Data yang dihitung merupakan data PDRB tahunan menurut bidang usaha masing-masing provinsi di Indonesia.

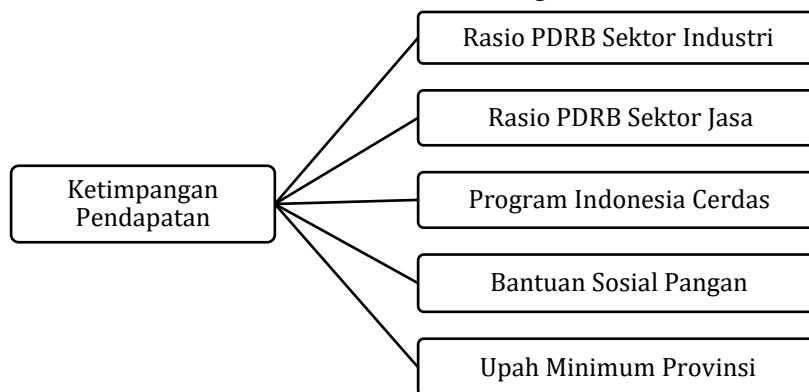
$$\text{Ratio GRDP industrial sector} = \frac{\text{GRDP industri}}{\text{Total GDRP}} \times 100$$

$$\text{Ratio GRDP service sector} = \frac{\text{GRDP service}}{\text{Total GDRP}} \times 100$$

Proses estimasi regresi pada data panel melibatkan langkah-langkah kompleks seperti: mengestimasi parameter dalam model ekonometrik menggunakan metode *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*; melakukan seleksi model terbaik dengan

menggunakan uji Chow dan uji Hausman, serta dapat melakukan uji Lagrange Multiplier apabila diperlukan; menilai kecocokan model terpilih dengan model estimasi yang dipilih; serta menguji validitas pengaruh variabel independen terhadap model yang telah dipilih.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Dikembangkan oleh penulis (2024)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tabel 1 di bawah ini memaparkan hasil estimasi regresi menggunakan *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*, serta hasil pengujian untuk memilih model terbaik. Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman, model estimasi terbaik adalah *Fixed Effect Model (FEM)* karena nilai signifikansi statistik F dan  $\chi^2$  masing-masing adalah 0,000 ( $< 0,01$ ) dan 0,0524 ( $< 0,10$ ) menunjukkan probabilitas empiris yang signifikan.

**Tabel 1.** Hasil Estimasi Model Ekonometrika Regresi Data Panel - *Cross-section*

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
C	0,24917	0,58492	0,36274
RPDRBind	0,00074	-0,00249	-0,00019
RPDRjasa	0,00173	-0,00252	0,00088
PIP	2.76E-14	3.90E-14	2.78E-14
BSP	3.36E-16	7.30E-16	4.59E-16
UMP	6.14E-10	-1.67E-08	-1.54E-08
$R^2$	0,24307	0,96076	0,17876
Disesuaikan $R^2$	0,21999	0,94938	0,15372
Statistik F	10.53275	84.40242	7.13934

Prob. Statistik F	0,00000	0,00000	0,00001
Hasil Pemilihan Model			
(1) Uji Chow			
Prob. F (33,131) = 0,0000; Cross-Section F (33.131) = 72.601942			
(2) Uji Hausman			
Prob $\chi^2 = 0,0524$ ; Cross-Section $\chi^2(5) = 10,951131$ ;			

Sumber: BPS dan Kemendikbud, diolah

Hasil dari estimasi lengkap model *Fixed Effect Model (FEM)* ditampilkan dalam Tabel 2. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa model FEM menunjukkan tingkat signifikansi yang kuat secara empiris, dengan nilai statistik F sebesar 0,00000 (< 0,01) dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,960758; yang menunjukkan bahwa model FEM mempunyai kemampuan prediksi yang tinggi. Selain kelima variabel pada model ekonometrik, terdapat dua variabel yang mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan yaitu variabel Rasio PDRB Sektor Industri dan variabel Upah Minimum Provinsi dengan probabilitas atau signifikansi statistik empiris masing-masing sebesar 0,0164. (< 0,01) dan 0,0000 (< 0,01).

Variabel Rasio PDRB Sektor Industri memiliki koefisien regresi sebesar - 0,584919 dengan pola hubungan linier-linier yang terdefinisi dengan jelas. Ini berarti setiap peningkatan sebesar 1% dalam Rasio PDRB Sektor Industri akan mengurangi Ketimpangan Pendapatan sebesar 0,584919. Sebaliknya, setiap penurunan sebesar 1% dalam Rasio PDRB Sektor Industri akan meningkatkan Ketimpangan Pendapatan sebesar 0,584919.

Variabel Upah Minimum Provinsi memiliki koefisien regresi sebesar -1,67E-08 dengan pola hubungan linear-linear. Ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu rupiah dalam Upah Minimum Provinsi akan mengurangi Ketimpangan Pendapatan sebesar 1,67E-08. Sebaliknya, setiap penurunan 1 rupiah dalam Upah Minimum Provinsi akan meningkatkan Ketimpangan Pendapatan sebesar 1,67E-08..

**Tabel 2.** Model Estimasi *Fixed Effect Model (FEM)*.

$Gini_{it} = 0.58492 - 0.00249 RPDRBind_{it} - 0.00252 RPDRBjasa_{it}$			
	(0,0164)**		(0,1270)
	+ 3.90E14 $SIP_{it}$	+ 7.30E16 $FSA_{it}$	- 1.67E08 $PMW_{it} + e_t$
	(0,1135)	(0,2867)	(0,0000)*
$R^2 = 0,960758$ ; $DW = 1,170494$ ; $F = 84,40242$ ; Masalah. $F = 0,00000$			

Sumber: BPS dan Kemendikbud, diolah. Keterangan: \*Signifikan pada  $\alpha = 0,01$ ; \*\*Signifikan pada  $\alpha = 0,05$ ; \*\*\*Signifikan pada  $\alpha = 0,10$ ; Angka-angka dalam tanda kurung adalah nilai probabilitas dari t statistik

Kemudian selanjutnya pengaruh dan konstanta wilayah yang disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan tabel tersebut, wilayah Provinsi DKI Jakarta menjadi nilai konstanta tertinggi yaitu 0,71870. Artinya berhubungan dengan pengaruh variabel Rasio PDRB Sektor Industri, Rasio PDRB Sektor Jasa, Program Indonesia Pintar, Bantuan Sosial Pangan, dan Upah Minimum Provinsi di Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk memiliki tingkat Ketimpangan Pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Setelah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Papua adalah dua provinsi dengan konstanta terbesar dalam hal ini.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai konstanta terendah sebesar 0,51373. Ini mengindikasikan bahwa, dalam konteks pengaruh variabel seperti Rasio PDRB Sektor Industri, Rasio PDRB Sektor Jasa, Program Indonesia Pintar, Bantuan Sosial Pangan, dan Upah Minimum Provinsi di Indonesia, provinsi ini cenderung menunjukkan tingkat Ketimpangan Pendapatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Lampung menunjukkan konstanta terendah.

**Tabel 3.** Efek dan Konstanta Wilayah

No.	Provinsi	Efek	Konstanta Wilayah
1	Aceh	-0,045034	0,53989
2	Sumatera Utara	-0,064254	0,52067
3	Sumatera Barat	-0,051816	0,53310
4	Riau	-0,035960	0,54896
5	Jambi	-0,040203	0,54472
6	Sumatera Selatan	0,001271	0,58619
7	Bengkulu	-0,035982	0,54894
8	lampung	-0,051610	0,53331
9	Kep. Bangka Belitung	-0,071186	0,51373
10	Kep. Riau	0,041812	0,62673
11	DKI Jakarta	0,133780	0,71870
12	Jawa barat	0,019411	0,60433
13	Jawa Tengah	-0,025413	0,55951
14	DI Yogyakarta	0,102741	0,68766
15	Jawa Timur	-0,008896	0,57602
16	Banten	0,045576	0,63050



17	Bali	0,037663	0,62258
18	Nusa Tenggara Barat	0,009024	0,59394
19	Nusa Tenggara Timur	-0,039206	0,54571
20	Kalimantan Barat	-0,040979	0,54394
21	Kalimantan Tengah	-0,014547	0,57037
22	Kalimantan Selatan	0,004401	0,58932
23	Kalimantan Timur	0,022947	0,60787
24	Kalimantan Utara	-0,044319	0,54060
25	Sulawesi Utara	0,037507	0,62243
26	Sulawesi Tengah	-0,035556	0,54936
27	Sulawesi Selatan	0,036016	0,62094
28	Sulawesi Tenggara	0,036928	0,62185
29	Gorontalo	0,022804	0,60772
30	Sulawesi Barat	-0,030434	0,55449
31	maluku	-0,034664	0,55026
32	Maluku Utara	-0,034318	0,55060
33	Papua Barat	0,070382	0,65530
34	Papua	0,082117	0,66704

Sumber: BPS dan Kemendikbud, diolah

## Diskusi

### *Pengaruh PDRB sektor industri terhadap ketimpangan pendapatan*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio PDRB sektor industri mempunyai pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya jika kontribusi PDRB sektor industri meningkat maka dapat mendorong taraf hidup yang layak karena penyerapan tenaga kerja banya diserap oleh sektor industri sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan. Pernyataan tersebut berkaitan dengan Teori Neo-Klasik yang menyatakan bahwa ketika kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian dapat dialihkan atau diserap oleh sektor industri, maka kemungkinan besar kesenjangan antar wilayah akan berkurang. Hal ini mengindikasikan adanya proses redistribusi sumber daya ekonomi dari sektor pertanian yang cenderung kurang produktif ke sektor industri yang lebih produktif, yang pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah (Sjafrizal, 2008). Kemudian, penelitian Putri & Monika, (2022) juga menemukan bahwa PDRB industri berdampak buruk pada ketimpangan di Jawa Barat selama periode 2011-2019.

### *Pengaruh PDRB sektor jasa terhadap ketimpangan pendapatan*

Rasio PDRB sektor jasa tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Kemungkinan penyebabnya adalah karena perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang saat ini memiliki dampak yang signifikan dan tidak dapat diabaikan, terutama dalam meningkatkan produktivitas sumber daya di sektor perekonomian, khususnya dalam penyediaan jasa di sektor jasa. Transisi menuju penggunaan teknologi yang lebih efisien inilah yang menyebabkan dampak peningkatan rasio PDRB sektor jasa terhadap ketimpangan pendapatan menjadi tidak terlalu langsung.

#### *Pengaruh Program Indonesia Pintar Terhadap Ketimpangan Pendapatan*

Program Indonesia Pintar (PIP) tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena program ini lebih berfokus pada peningkatan tingkat pendidikan dibandingkan mengurangi ketimpangan pendapatan. Meskipun PIP dirancang untuk membantu siswa dari keluarga berpenghasilan rendah agar dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik, PIP tidak secara langsung menargetkan pengurangan kesenjangan pendapatan di masyarakat secara keseluruhan. Kebaharuan penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan pendidikan dengan ketimpangan pendapatan, sebuah hubungan yang telah dilakukan di negara lain, namun belum pernah diteliti di Indonesia.

#### *Pengaruh Bantuan Sosial Pangan terhadap Ketimpangan Pendapatan*

Bantuan Sosial Pangan (BSP) tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini bisa terjadi karena bansos ini baru dilaksanakan secara bertahap selama enam tahun terakhir, sehingga dampaknya mungkin belum sepenuhnya terasa atau akan memakan waktu lebih lama untuk benar-benar terlihat. Selain itu, bisa juga karena bantuan ini tidak berdampak langsung terhadap pendapatan individu atau keluarga, maka bantuan pangan memberikan akses kepada penerima pangan atau kebutuhan pangan tertentu, namun tidak secara langsung meningkatkan pendapatannya. Akibatnya, program-program tersebut mungkin tidak memberikan dampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antara kelompok miskin dan kaya.

#### *Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan Pendapatan*

Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh negatif pada ketimpangan pendapatan. Penetapan UMP berpotensi mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan karena UMP dapat menjaga tingkat pendapatan pekerja penerima gaji pada batas minimal yang telah ditentukan. Selain itu, peningkatan UMP dari tahun ke tahun juga mampu mendorong motivasi angkatan kerja untuk bekerja lebih giat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum dan pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Ivanovi Sulistyaningrum et al., (2022) juga

menemukan bahwa selama tahun 2011-2022 di Provinsi Pulau Jawa, Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara itu, Masfila, (2021) ditemukan bahwa di Pulau Sulawesi selama tahun 2011- 2022, Upah Minimum Provinsi berdampak negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

## KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak dari perubahan struktur ekonomi dan kebijakan pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan. Secara spesifik, penelitian ini menemukan bahwa beberapa faktor memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Misalnya, variabel Rasio PDRB Sektor Industri yang mencerminkan struktur ekonomi, terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya sektor industri mampu menciptakan lapangan kerja yang luas, yang pada akhirnya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. 2) Upah Minimum Provinsi sebagai variabel yang mewakili kebijakan pemerintah terbukti berpengaruh negatif. Artinya penetapan Upah Minimum Provinsi juga berkontribusi terhadap penurunan pendapatan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. 3) Variabel independen yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan adalah Rasio PDRB Sektor Jasa, Program Indonesia Pintar, dan Bantuan Sosial Pangan

Implikasi praktis dari penelitian ini memberikan informasi bahwasannya perubahan struktur perekonomian khususnya pada sektor industri dapat menjadi faktor utama yang berperan dalam menentukan ketimpangan pendapatan. Lebih lanjut, temuan menunjukkan bahwa beberapa kebijakan pemerintah belum efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, kecuali penetapan Upah Minimum Provinsi yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan yang berujung pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, strategi pengembangan sektor industri dan kenaikan upah minimum dapat menjadi langkah penting dalam upaya mengatasi masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Keterbatasan pada penelitian ini antara lain terbatasnya data untuk meneliti seluruh provinsi di Indonesia dan tahun pengamatan hanya sampai tahun 2022 karena kendala ketersediaan data yang berada di luar kendali peneliti. Selain itu peneliti hanya menggunakan tiga variabel (Program Indonesia Pintar, Bantuan Sosial Pangan, dan Upah Minimum Provinsi) untuk mewakili kebijakan pemerintah karena variabel lain seperti Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan, dan Program Kartu Prakerja tidak mempunyai data lengkap sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai variabel dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti berharap pada penelitian selanjutnya akan ditambahkan lebih banyak variabel untuk mewakili kebijakan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamanda. (2020). The Effect of Government Expenditure on Income Inequality and Poverty in Indonesia. *Info Artha*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.31092/jia.v4i1.614>
- Ansari Samani, H., Rouzbahani, M., Dalvandi, H., & Sadeghi, R. (2024). Income inequality and environmental degradation in the provinces of Iran. *Environmental Health Engineering and Management*, 11(1), 25–30. <https://doi.org/10.34172/EHEM.2024.04>
- BPS. (2022). Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2022. *Berita Resmi Statistik*, No. 52/07/(15 Juli 2022), 1–8.
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243–258. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>
- Goh, S. K., Wong, K. N., Ayupp, K., & Lai, Y. W. (2023). Income Inequality, Income Growth and Government Redistribution in Malaysia: What Do We Know in the Long Run? *Malaysian Journal of Economic Studies*, 60(1), 69–87. <https://doi.org/10.22452/MJES.vol60no1.4>
- Gultom, H., Kindangen, P., & Kaawung, G. M. V. (2020). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(1), 39–53.
- Hasan, M. (2022). EKONOMI PEMBANGUNAN Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Imam, S., & Jamaliah. (2023). Analisis Kebijakan Publik Dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *ETNIK: Jurnal Ekonomi-Teknik*, 2(5), 399–405.
- Istikharoh, Prijanto, W. J., & Destiningsih, R. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 - 2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(1), 109–125. <http://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/1399>
- Ivanovi Sulistyaningrum, B., Bhinadi, S.E, M.Si, D. A., & Dwi Astuti, S.E, M.Si, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 891–902. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.454>
- Jhingan, M. L. (2012). International Economics 6th Edition. In *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*. Vrinda Publications (P) LTD.
- Kusuma, D. S. D., Sarfiah, S. N., & Septiani, Y. (2019). Analisis Pengaruh Produk

- Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(3), 282–293.
- Kuznets, S. (2011). Modern Economic Growth: Findings and Reflections. *American Economic Association*, 63(3), 247–258.
- Masfila, D. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2020. *Skripsi*.
- Nangarumba, M. (2015). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. *Jesp*, 7(2), 9–26.
- Oksamulya, A., & Anis, A. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(2), 19. <https://doi.org/10.24036/jkep.v2i2.12637>
- Pratiwi, M. C. Y. (2021). Analisis Ketimpangan Antarwilayah dan Pergeseran Struktur Ekonomi di Kalimantan. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(1), 131–154. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i1.779>
- Putri, H. S., & Monika, A. K. (2022). Analisis Perubahan Struktural dan Pengaruhnya Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Jawa Barat Tahun 2011-2019. *Seminar Nasional Official Statistics, 2012*, 833–842.
- Rahman, R., & Putri, D. Z. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3, 37–48.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Niaga Swadaya. <https://books.google.co.id/books?id=hb05oLQBneQC&lpg=PP1&hl=id&pg=PA111#v=onepage&q&f=false>
- Szirmai, A. (2012). Industrialisation as an Engine of Growth in Developing Countries, 1950-2005. *Structural Change and Economic Dynamics*, 23(4), 406–420. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2011.01.005>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development Twelfth Edition*.
- Wibowo, T. (2017). Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 111–132. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.184>
- Yasni, R., & Yulianto, H. (2020). Peran Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 4(1), 39–63. <https://doi.org/10.35837/subs.v4i1.819>
- Yusuf, A. A., Anglingkusumo, R., & Sumner, A. (2021). A direct test of Kuznets in a developing economy: a cross-district analysis of structural transformation and inequality in Indonesia. *Regional Studies, Regional Science*, 8(1), 184–206. <https://doi.org/10.1080/21681376.2021.1924850>